

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

_____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

_____. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

_____. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- _____. *Pergulatan Hukum dan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. London: Penguin Books, 1968.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

JURNAL

Anggistya, Divani Khaira, dan Alisyia Afifah Maulidina Putri Abdillah. "Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatik." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol. 1, No. 1, 2023. Diakses dari <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236>

Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1046>

Gundling, Lothar. "Public Participation in Environmental Decision Making." *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 43, No. 3, 1994. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/iclqaj/43.3.613>

Hanafi, Muhamad Irsyad; Damayanti, Lutvi Dafina; Nazulfa, Indah. (2025). *Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Constitution Journal. Diakses dari <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/113>.

- Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 16, No. 3, 2012. Diakses dari <https://doi.org/10.22146/jsp.10898>
- Jurdi, Fajlurrahman. “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017. Diakses dari <https://doi.org/10.22146/jmh.16692>
- Mahfud MD, Moh. “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” Makalah disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 29–31 Mei 2006.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Omnibus Law dan Masa Depan Legislasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Pratama, Nur Aji. “Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi *Idee des Recht* Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.” *CREPIDO*, Vol. 4, No. 2, November 2022. Diakses dari <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>
- Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1811>

Tauda, Gunawan A. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 2, Mei 2024. Diakses dari <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>

Wicaksono, Dian Agung. “Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021. Diakses dari <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.668>

Wijaya, Nurharis. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Proporsionalitas dan Efektivitas Dalam Penerapan Serta Pelaksanaannya*. Jurnal Legal Reasoning. Diakses dari <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/2227>

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

INTERNET

Hidayat, Arief, "Negara Hukum Indonesia: Meluruskan Reduksi "Negara Undang-Undang" Menuju Supremasi Keadilan", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/negara-hukum-indonesia--meluruskan-reduksi-negara-undang-undang-menuju-supremasi-keadilan-lt6a1ebda061bb5/>